

DAFTAR REFERENSI

A. Buku-Buku

- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin .2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.PT Gramedia Pustaka Utama.Jakarta
- Hariwijaya,M. *Medotologi dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Yogyakarta. Parama Ilmu.
- Hardani,dkk.2020.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Kadji,Yulianto.2015. *FORMULASI dan IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press. Hal 26.(e-book)
- Raco,Dr.J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*.Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. (e-book)
- Sugono,Dendy.2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa.Jakarta. (e-book)
- Sarwono,Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.Graha Ilmu. Yogyakarta
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008, Cet.6. 330
- SM,Oentarto,dkk.2004. *Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan*.Jakarta. Samitra Media Utama.
- Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D*. Bandung.Alfabeta.
- Widjaja, Prof.Drs.H.A.W. 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. PT Rineka Cipta.

B. Skripsi

- Yunita,Eva.2018. *POLITIK PEMEKARAN WILAYAH (Studi Terhadap Pemekaran Kecamatan Sukamaju Selatan Di Kabupaten Luwu Utara)*.UIN ALAUDDIN. Makassar.

Agustang.2017. *ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN (Studi Kasus Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD Kab Wajo)*. UIN ALAUDDIN. Makassar

C. Artikel Jurnal.

Aidawati. *Studi Kelayakan Pemekaran Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang*.jurnal ilmu pemerintahan. eJournal Ilmu Pemerintahan. (Vol: 7 No:4 Tahun 2019).

Amir,dkk. *Kebijakan Pemekaran Kecamatan dan Pelayanan Masyarakat*. eJournal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Riau. (Vol 15 No 1 Tahun 2018).

Darul Asnawan. *Pelaksanaan Program Corporate Social Responcibility (CSR) Vico Indonesia Bidang Peningkatan Kemampuan Lokal di kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kertanegara*. eJournal Ilmu Pemerintahan. Universitas Mulawarman. (Vol 6 No 4 Tahun 2018).

Galang Surya Gemilang. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bimbingan dan Konseling*. eJurnal Fokus Konseling. Universitas Nusantara PGRI Kediri. (Vol 2 No 2 Tahun 2016)

Imanuel. *Studi Tentang Proses Pemekaran Kecamatan Malinau Selatan Menjadi Tiga Kecamatan Kabupaten Malinau*. eJournal Pemerintahan Integratif. (Vol:4 No:2 Tahun 2016).

Muhammad Aulia Wirawan. *Proses Persiapan Pemekaran Kecamatan Baru Lenek Raya Kabupaten Lombok Utara*.jurnal politik. Tahun 2018.

Putra,Novliwanda Ade,dkk.*Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.eJournal Ilmu Administrasi Negara. (Vol 16 Nomor 1 Tahun 2020).

Rida Nuradhawati. *Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia*. eJournal Academia Praja. Universitas Jendral Achmad Yani. (Vol 2 No 1 Tahun 2019)

Ryan.Hendrata. *Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Stabilitas Perekonomian di Kabupaten Bulungan*. eJournal Ekonomi Pembangunan Wilayah. (Vol 1 No 1)

Yuyu Rahmayani,dkk. *Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bulukumba*. eJournal Ilmu Administrasi Negara. Universitas Muhammadiyah Makasar.(Volume 2 No 2 Tahun 2021).

D. Dokumen.

Data Panitia Pemekaran Kecamatan Baru Selat Gelam.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara dan Kecamatan Kundur Barat.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Durai.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 yaitu tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. ★

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

E. Website.

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html

<https://gerbangkepri.com/2020/08/11/dprd-karimun-sepakati-berikan-tanggapan-ranperda-pembentukan-kecamatan-dalam-bentuk-tertulis/>

<https://jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia> . (diakses tanggal 22 juni 2021 jam 14:40)

<https://karimunkab.go.id>.